

URGENSI MEMBANGUN PARLEMEN MODERN

URGENCY FOR DEVELOPING MODERN PARLIAMENT

Debora Sanur L

(Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi/P3DI
Sekretariat Jenderal DPRRI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: debora_sanur@yahoo.com)

Naskah Diterima: 2 November 2015, direvisi: 4 Desember 2015,
disetujui: 11 Desember 2015

Abstract

Up until now, the satisfaction level of citizen to their representative on House of Representative Indonesia is still Low. Therefor House of Representative Indonesia develop new concept which is modern parliament. Through modern parliament, citizen will able to communicate their aspiration directly to their representative related on many issues that currently happen. On the other hand, House of Representative Indonesia will be able to be an institution that able to fulfill society needs. This article aim to decipher the cause of the need for house of representative Indonesia to develop modern parliament concept, supporting factors to create modern parliament and how to materialize modern parliament. This article is using representative concept, accountability, modern parliament and digital democracy. Even though application of modern parliament concept is not convenient, but house of representative indonesia need to strive to materialize this concept to strengthen representative democracy in Indonesia.

Key words: House of Representative Indonesia, A Modern Parliament, Accountability, Information Technology, Digital Democracy.

Abstrak

Selama ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR masih rendah. Untuk itu DPR mengembangkan konsep baru yaitu konsep parlemen modern. Melalui parlemen modern masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Dilain pihak, DPR dapat menjadi lembaga yang mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penulisan ini untuk menguraikan penyebab perlunya DPR membangun konsep parlemen modern, faktor pendukung terciptanya parlemen modern serta cara memwujudkan parlemen modern. Tulisan ini menggunakan konsep perwakilan, akuntabilitas, parlemen modern dan demokrasi digital. Walau penerapan konsep parlemen modern ini tidak mudah, namun DPR perlu terus berupaya mewujudkannya demi memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia

Kata kunci: DPR, Parlemen Modern, Akuntabilitas, Teknologi Informasi, Demokrasi Digital.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan dalam DPR mulai terjadi saat memasuki masa reformasi. Dalam masa ini posisi eksekutif dan legislatif menjadi setara sebagai mitra. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah menjadikan DPR menjadi lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam posisi setara dengan Presiden. Oleh sebab itu, sejak memasuki masa reformasi, dimana demokrasi dan demokratisasi mulai timbul kembali, baik pemerintah maupun DPR bersama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat.

Selanjutnya, dengan memasuki era digital, demokrasi di Indonesia sebagaimana negara lain di dunia kembali menghadapi demokrasi dengan tantangan dan dinamika baru. Hal ini berbeda dengan kondisi yang terjadi sebelum memasuki era digital. Pada masa itu keterlibatan maupun

interaksi antara aktor politik dengan masyarakat awam secara langsung biasanya hanya muncul pada masa pemilu dalam proses pencarian legitimasi para aktor tersebut. Saat ini, dengan hadirnya teknologi informasi serta berbagai jaringan media sosial telah membuat arus informasi beredar dengan begitu cepat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi sekaligus langsung memberi respon baik positif atau pun negatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan parlemen modern dalam DPR RI sudah menjadi kebutuhan DPR. Sama halnya dengan parlemen di negara-negara lain, konsep parlemen modern sudah diperlukan untuk menjawab tantangan jaman yang semakin maju dan berbasis teknologi. Secara umum, parlemen di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama akibat dampak globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap informasi. Namun untuk Indonesia, konsep ini juga dinilai tepat untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap turunnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Adalah DPR RI periode 2014-2019 yang mengembangkan konsep parlemen modern sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR. Konsep ini bertujuan agar DPR dapat menjadi lembaga perwakilan yang modern serta dapat berkinerja lebih baik melalui visi transparansi dan peningkatan partisipasi publik. Sehingga DPR pun menjadi lebih mudah dalam menjalankan fungsi representasinya.¹

Ada beberapa hal yang menjadi prioritas program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) DPR Tahun 2015–2019 demi mengusung konsep parlemen modern ini. Program dan kegiatan tersebut antara lain adalah DPR akan lebih memperhatikan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai DPR dengan mengembangkan museum serta membangun *Learning Center* dan *Art Center* serta *Exhibition Hall* untuk dapat diakses masyarakat yang ingin mengetahui proses reformasi yang sedang dilakukan DPR. Konsep parlemen modern ini juga akan membawa DPR beralih dari cara manual ke digital. Dimana, setiap anggota DPR akan dilengkapi dengan email yang diproduksi oleh website DPR. Sistem *paperless* atau tidak menggunakan kertas juga akan diterapkan dalam setiap rapat-rapat yang akan diselenggarakan DPR.²

Terkait peraturan yang mendukung terlaksananya parlemen modern dalam DPR, DPR telah memiliki regulasi yang mengatur agar masukan, kritikan, keluhan dan saran dari masyarakat mengenai tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI dapat ditampung dan ditindaklanjuti dengan baik. Peraturan tersebut ialah Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; yang merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan BURT Nomor: 08/BURT/DPR RI/I/2010-2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan pengaduan Masyarakat DPR RI.³

Berdasarkan renstra DPR dan regulasi tersebut DPR siap untuk bertransformasi menjadi parlemen yang lebih terbuka dalam memberikan informasi sekaligus membuka peluang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR. Melalui parlemen modern ini, DPR dapat

memastikan bahwa informasi parlemen akan disebar secara proaktif sehingga terjadi peningkatan partisipasi dan dukungan publik pada kerja DPR.

B. Perumusan Masalah

Selama ini hubungan antara DPR dengan konstituennya kerap menemui beberapa permasalahan. Masalah tersebut seringkali disebabkan oleh kebijakan dan program yang dibuat DPR tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dilain pihak, informasi dan respon masyarakat terhadap DPR yang tidak tersistematika dengan baik membuat DPR sulit untuk menindaklanjuti setiap kebutuhan masyarakat tersebut. Permasalahan seperti ini yang akhirnya semakin mendorong kepercayaan masyarakat terhadap DPR semakin menurun. Berangkat dari permasalahan tersebut konsep parlemen modern bagi DPR RI dianggap perlu dan dapat meningkatkan kredibilitas DPR dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pertanyaan dalam tulisan ini ialah:

- a. Mengapa DPR perlu membangun konsep parlemen modern?
- b. Apa faktor pendukung parlemen modern?
- c. Bagaimana cara mewujudkan parlemen modern?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menguraikan mengenai penyebab perlunya parlemen modern dalam DPR RI.
- b. Untuk menguraikan mengenai faktor pendukung dalam parlemen modern.
- c. Untuk menguraikan mengenai cara mewujudkan parlemen modern.

D. Kerangka Pemikiran

Konsep Perwakilan

Ada dua teori klasik yang dapat menjelaskan hakekat hubungan wakil dengan terwakil, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.⁴ Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Oleh karena itu, wakil hendaknya selalu berpandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat yang diberikan terwakil dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian pandangan wakil secara pribadi dalam proses politik tidak diperkenankan dalam kapasitasnya sebagai wakil. Perbedaan pandangan antara wakil dengan

¹ DPR RI, "Ringkasan Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014—13 Agustus 2015), Langkah DPR Menuju Parlemen Modern Dalam Demokrasi Indonesia", Jakarta, Agustus, 2015, hlm 63.

² Parlemenarian, "DPR Menuju Parlemen Modern", *Parliamentaria edisi 122 TH. XLV*, 2015, hlm 8.

³ *Ibid*, hlm 27.

⁴ Austin Ranney, *The Governing of Man*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1996, hlm. 268-271.

terwakil dapat mengakibatkan menurunnya reputasi dan legitimasi si wakil. Sebaliknya, wakil yang sangat terikat akan mengalami kelambanan dalam berkreasi dalam gerak politiknya.

Jean Mansbridge membuat kategori perwakilan dalam empat bentuk; *promissory*, *anticipatory*, *gyroscopic* dan *surrogacy*. Perwakilan *promissory* merupakan bentuk perwakilan di mana wakil dinilai berdasarkan janji-janji yang dibuat di hadapan konstituen pada saat kampanye. Perwakilan *anticipatory* adalah perwakilan di mana wakil justru berpikir soal pemilu yang akan datang berikutnya tanpa menghiraukan janji-janji kampanyenya. Perwakilan *gyroscopic* menekankan adanya seorang wakil yang berangkat dari pengalaman dirinya sendiri ketika bicara tentang kepentingan konstituen. Selanjutnya perwakilan *surrogacy* adalah suatu perwakilan dimana seorang wakil berusaha mewakili konstituennya diluar daerah pemilihannya.⁵

Konsep Akuntabilitas

Menurut Gray et al⁶, akuntabilitas bukan hanya milik individu atau organisasi saja tetapi menjadi hak dan milik masyarakat umum yang mempunyai keterkaitan atau keterpautan dengan individu atau organisasi tersebut. Hak masyarakat tersebut timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Oleh sebab itu akuntabilitas harus disiapkan oleh subyek yang melakukan aktivitas kepada publik agar individu atau organisasi mendapat kepercayaan publik atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Kluvers dan Tippett⁷, akuntabilitas telah mengalami pergeseran makna dimana akuntabilitas dahulu menekankan pada nilai internal yaitu laporan pertanggungjawaban dibuat hanya untuk mematuhi persyaratan hukum. Padahal makna akuntabilitas seharusnya menekankan pada nilai-nilai personal yaitu lebih kepada pelayanan pihak-pihak yang terkait dimana laporan pertanggungjawaban yang dibuat harus mengandung informasi yang jujur, objektif dan transparan.

⁵ Jane Mansbridge, "Rethinking Representation", *American Political Science Review*, Vol. 97, No. 4, 2003. Cambridge: Harvard University. Hlm. 515; bdk. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 41.

⁶ R. Gray, Jan Bebbington, and David Collison, "NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital", *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 19, No.3, 2006. hlm. 319-348.

⁷ Kluvers, R. and Tippett, J. "Mechanisms of accountability in local government: an exploratory study." *International Journal of Business and Management*, Vol. 5 No. 7, 2010. hlm. 46-53.

Menurut Stanbury, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dari setiap pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dilaksanakan melalui suatu media dan dilaksanakan secara periodik.⁸ Oleh sebab itu melalui akuntabilitas, publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Dalam hal ini media pertanggungjawaban akuntabilitas tersebut tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi juga mencakup praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tulisan. Maka, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Konsep Parlemen Modern

Konsep Parlemen modern pertama kali didengungkan dalam Konferensi Uni Eropa tentang "*The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance*" pada tahun 1997.⁹ Selanjutnya Konsep Parlemen modern dimatangkan pada Tahun 2003, di Konferensi di Berlin, Jerman tentang "*Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*."¹⁰ Konsep ini diperkuat pada Tahun 2012 dengan menyerukan *Declaration on Parliamentary Openness* kepada seluruh parlemen dunia.¹¹

Konsep parlemen modern ini dimulai oleh Parlemen Inggris yang membuka akses informasi kepada publik. Mereka menggunakan teknologi informasi serta berkerjasama dengan media agar

⁸ W.T Stanbury, *Accountability to citizens in the westminster Model of Government: More Myth Than Reality*, Vancouver: Fraser Institute, 2003.

⁹ Center for Election and Political Party FISIP-UI, *DPR RI: Parlemen Modern Yang Menabuh Genderangnya Sendiri*, 2014. Lihat European Commission, "Paper Review: The Future of Parliamentary Democracy: Transition and Challenge in European Governance", *Green Paper for the Conference of the European Union*, Brussel: Secretariat General European Commission, September 2000.

¹⁰ *Ibid*. Lihat Max Planck Society, 2013, Ten Years After the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, (*online*), (http://openaccess.mpg.de/mission-statement_en, diakses tanggal 3 Desember 2015).

¹¹ *Ibid*. Lihat Openingparliament.org, 2012, Declaration on Parliamentary Openness, (*online*), (<http://www.openingparliament.org/declaration>, diakses tanggal 3 Desember 2015).

dapat lebih dekat dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi representasinya. Parlemen Inggris menyadari pentingnya peran media dalam mengedukasi publik tentang kinerja dewan, peran dan fungsi dewan, bahkan keseharian para anggota parlemen. Menurut *Hansard Society*, penggunaan teknologi dan adanya kerjasama dengan media memudahkan parlemen dalam memberikan akses informasi dan mengedukasi publik.¹²

Robyn Webber, menyampaikan bahwa

*"...that there are two main elements to their desire to make better connections between the community and their formal parliamentary work particularly in committees. The first is the desire to produce better inquiries and reports which encompass the views of those affected by government activity as well as those of specialist groups. The second aim is to draw people more into the practical workings of the democratic processes to help them understand the role and value of the parliamentary institutions in society."*¹³

Oleh sebab itu, representasi Anggota DPR RI akan lebih efektif bila dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada rakyat mengenai proses, program kerja yang dilakukan parlemen melalui parlemen itu sendiri.

Konsep Demokrasi Digital

Menurut Fayakhun Andriadi, demokrasi digital hadir akibat adanya kemajuan teknologi digital dalam demokrasi. Bila dahulu ruang merujuk pada sesuatu yang bersifat fisik, di era digital, ruang juga bersifat maya. Masyarakat memanfaatkan ruang maya sebagai sarana partisipasi politiknya, istilahnya *cyberspace politic* (politik berbasis ruang maya). Partisipasi politik dalam ruang maya ini dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik partisipan atau warga negara. Namun, warga negara tetap dapat mengekspresikan partisipasi politiknya secara maya melalui perangkat-perangkat digital. Meski disampaikan secara maya, aspirasi yang disuarakan seorang warga negara melalui media sosial dapat

didengar oleh publik maupun oleh pemerintah melalui jaringan media maya yang tersedia. Dan aspirasi yang disuarakan ini memiliki dampak terhadap realitas politik.¹⁴

Salah satu pemikir demokrasi era digital ialah Diana Saco. Menurutnya demokrasi bisa dijalankan baik dalam ruang yang diartikan secara fisik dan juga virtual. Pemahaman ini berangkat dari pengertian ruang publik yang tidak hanya mengacu pada ruang secara fisik, tetapi juga virtual. Sedangkan, teknologi adalah hal tidak bisa disebut sebagai faktor yang menyempurnakan maupun faktor yang dapat meruntuhkan konsep demokrasi. Saco menamai idenya mengenai *cyberspace* sebagai Heterotopia. Heterotopia adalah sebuah ruang yang tidak hanya berbentuk khayalan atau fantasi, melainkan perwujudan dari sebuah strategi untuk melakukan sebuah pembentukan ruang. Berangkat dari konsep ruang ini, maka aktivitas demokrasi politik mulai memasuki sebuah ruang virtual, melalui internet dan alat-alat digital lainnya.¹⁵

Sementara itu, Lincoln Dahlberg mengistilahkan demokrasi digital sebagai *e-democracy*.¹⁶ Dahlberg mengemukakan beberapa posisi demokrasi digital, diantara yaitu sebagai *liberal-individualist*, *deliberative*, dan *counter-publics*¹⁷. Demokrasi digital *liberal-individualist* didefinisikan sebagai media digital yang menawarkan penyebaran informasi yang efektif antara individu dengan wakil-wakil mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, demokrasi digital *liberal-individualist* telah diperkuat dengan inisiatif pemerintah untuk menyediakan website yang mungkin dikunjungi oleh individu dalam rangka agregasi kepentingan dan lain-lain.¹⁸ Sementara itu, *deliberative democracy* bertumpu pada konsensus yang memungkinkan terwujudnya konsep demokrasi. *Deliberative democracy* ini memungkinkan terjadinya tukar debat yang rasional, maupun penyusunan opini publik. Media digital berperan besar dalam merealisasikan demokrasi yang deliberatif¹⁹. Sedangkan, *counter-public democracy*

¹² Kerangka Acuan Kegiatan Bekerja Membangun Parlemen Modern, Center for Election and Political Party FISIP-UI, 2015, hlm. 3. Lihat, Hansard Society, 2011, *Parliaments and Public Engagement: Innovation and Good Practice from Around the World*, hlm.37, (online), (<http://www.hansardsociety.org.uk/wp-content/uploads/2012/10/Parliaments-and-Public-Engagement-2012.pdf>, diakses 2 Desember 2015).

¹³ *Ibid.* Robyn Webber. "Increasing Public Participation in the Work of Parliamentary Committees". Dalam jurnal *Public Sector Attitudes to Parliamentary Committees – A Chairman's View*, pada acara seminar ASPG Parliament 2000 – Towards a Modern Committee System 2001, hlm. 42.

¹⁴ Fayakhun Andriadi, 27 Mei 2015, Era Digital Diuntungkan Pejabat dan Politisi, Tapi Jadi Neraka Bila Kontrol Diri Lemah, (online), (<http://www.rmol.co/read/2015/05/27/204100/Fayakhun-Andriadi:--Era-Digital-Untungkan-Pejabat-&-Politisi,-Tapi-Jadi-Neraka-Bila-Kontrol-Diri-Lemah->, diakses tanggal 3 Desember 2015).

¹⁵ Diana Saco, *Cybering Democracy: Public Space and The Internet*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002, hlm.xvii

¹⁶ Lincoln Dahlberg, "Re-Constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions'", *Online Journal: Sage Publication*, 2011, hlm. 855.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 858.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 860.

lebih dipahami sebagai pembentukan kelompok-kelompok politik, aktivisme, dan kontestasi daripada pembentukan opini publik secara rasional. Oleh sebab itu, digital media dapat memperkuat suara-suara alternatif yang termarginalisasi dalam ajang kontestasi kekuasaan maupun pembentukan kebijakan.²⁰

Menurut Jenkins dan Thorburn media sosial akan melahirkan terbentuknya medan baru dalam relasi-relasi sosial. Dimulai dari terbentuknya *cyberspace*, lalu membentuk *cyberculture*, dan akhirnya membentuk *cyber democracy*. Melalui media sosial akan timbul percakapan publik yang akhirnya menjadi partisipasi politik dalam media maya. Media sosial ini akan membuat perubahan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan kultur media, ekonomi sampai kepada bentuk pemerintahan serta aliansi politik.²¹ Mengutip pendapat Ithiel de Sola Pool²² media sosial adalah teknologi untuk memajukan kebebasan. Munculnya media sosial berpotensi membawa pengaruh politik karena berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan kultural akan membentuk ruang-ruang publik menjadi terbuka. Ada semacam pandangan bahwa dalam *cyberspace* dapat berubah menjadi *civic cyberspace*. Asumsi ini berkembang karena penggunaan media sosial dapat memunculkan peran baru bagi para penggunanya untuk langsung menjadi netizen. Yaitu sebuah kewarganegaraan yang aktif dan partisipatif untuk terlibat dalam proses-proses sosial bahkan politik.

II. PEMBAHASAN

A. Perlunya Parlemen Modern

Dalam menjalankan tugasnya DPR mempunyai tiga fungsi sesuai dengan Pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Ketiga fungsi DPR tersebut adalah:

1. Fungsi Legislasi, yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan rancangan undang-undang tersebut dapat diajukan oleh Presiden, hak inisiatif DPR maupun DPD.
2. Fungsi Anggaran (*budget*), yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden).
3. Fungsi Pengawasan (kontrol), yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan

DPR terhadap pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan Belanja negara maupun kebijakan pemerintah lainnya berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan fungsi tersebut, dalam menjalankan kewenangannya seringkali hasil yang DPR dapatkan belum berbanding lurus dengan kinerjanya. Pendapat tersebut umumnya muncul karena produk Undang-Undang yang dihasilkan belum mencapai target prolegnas yang sebenarnya telah ditetapkan oleh DPR RI sendiri.

Sejak memasuki masa pasca reformasi, dukungan dan kepercayaan masyarakat cenderung menurun. Pada DPR periode lalu, periode 2009-2014 berbagai lembaga riset menemukan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR. Riset yang dilakukan oleh *Pol-Tracking Institute*²³ menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja DPR. Hasil survei ini menemukan hanya 12,64 persen masyarakat yang berpendapat bahwa kinerja DPR periode 2009-2014 baik dan memuaskan. Sementara itu, 61,68 persen lainnya menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR, dan sebanyak 25,68 persen menyatakan tidak tahu.²⁴

Ada beberapa lembaga survei lainnya yang juga memiliki temuan yang sama. Salah satunya seperti hasil riset yang dilakukan oleh Institut Riset Indonesia (Insis) mengenai kinerja anggota DPR periode 2009-2014²⁵, riset tersebut menemukan bahwa banyak masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap lembaga DPR. Pernyataan ketidakpuasan masyarakat tersebut tercermin sebagaimana tabel dibawah ini:

Sebagaimana tabel berikut ini, terlihat bahwa masyarakat yang tidak puas terhadap DPR mengungguli setiap kegiatan kerja DPR. Terutama dalam hal terkait pengawasan serta tingkat kemampuan DPR dalam menampung aspirasi, mayoritas masyarakat menyatakan ketidakpuasannya. Ketidakpuasan masyarakat dalam kegiatan pengawasan DPR mencapai 50.9% sementara ketidakpuasan masyarakat dalam

²⁰ *Ibid*, hlm. 863.

²¹ Henry Jenkins and David Thorburn, ed., *Democracy and New Media*, Cambridge: MIT Press, 2004, hlm. 8-11.

²² *Ibid*. hlm 7.

²³ Survei dilakukan pada 13-23 September 2013 secara serempak di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dengan total jumlah sampel mencapai 2010 responden.

²⁴ Tempo, 20 Oktober 2013, Lagi Hasil Survei Kinerja DPR Buruk, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2013/10/20/078523131/Lagi-Hasil-Survei-Kinerja-DPR-Buruk>, diakses tanggal 23 November 2015).

²⁵ Kompas.com, 29 September 2013, Survei Insis Publik Makin Tak Puas kinerja DPR, (*online*), (<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/29/1224051/Survei.Insis.Publik.Makin.Tak.Puas.pada.Kinerja.DPR>, diakses tanggal 23 November 2015).

Tabel 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPR

	Baik	Semakin Baik	Tidak Baik	Semakin tidak Baik	Tidak menjawab
Kinerja anggota dewan	20,5%	0,6%	60,9%	16,1%	1,9%
	Puas	Sangat Puas	Tidak Puas	Sangat tidak Puas	Tidak menjawab
Dalam pembentukan UU	37,3%	0,6%	42,9%	5,6%	13,7%
Dalam membahas APBN	34,8%	1,9%	39,8%	6,8%	16,8%
Terkait pengawasan	23,6%	1,9%	50,9%	8,7%	14,9%
Tingkat kemampuan menampung aspirasi. ²⁶	14,3%	1,2%	61,5%	12,4%	10,6%

Sumber: Survei Insis Publik Makin Tak Puas kinerja DPR.

menampung aspirasi mayoritas mencapai hingga 61,5%. Kondisi ini dapat dikatakan memprihatinkan mengingat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya mampu merepresentasikan harapan masyarakat.

Selanjutnya, riset terhadap DPR periode 2014-2019, yang dilakukan sejak awal periode DPR, ketidakpuasan masyarakat juga masih ditemui dalam temuan Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi). Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja anggota DPR akibat tidak berjalannya fungsi-fungsi DPR seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik. Menurut riset ini masyarakat berpendapat bahwa DPR tidak bertanggungjawab kepada konstituen mereka terutama pada masyarakat di dapil masing-masing anggota DPR. Bahkan melalui fungsi legislasi, DPR cenderung merevisi beberapa Undang-Undang yang hanya berkaitan pada kepentingan DPR sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat.²⁷

Bila dibandingkan dengan fungsi DPR lainnya, fungsi legislasi memang lebih sering menjadi sorotan publik. Hal ini karena hasil produk UU lebih mudah dipantau dengan hanya melihat jumlah UU yang dapat diselesaikan. Berbeda dengan fungsi pengawasan dan anggaran yang lebih sulit untuk diukur hasil kerjanya.

Sebenarnya, mengukur kinerja DPR tidaklah semudah dengan hanya melihat dari berapa banyak Undang-Undang dari prolegnas yang berhasil di sahkan. Bukan pula dari berapa besar penyerapan anggaran yang berhasil diserap. Menurut riset

"Mengukur Kinerja DPR RI Periode 2009-2014" yang dilakukan oleh Reni Suwarso, dkk dari lembaga riset *Center for Election and Political Party*, Universitas Indonesia,²⁸ pada dasarnya kinerja DPR adalah kerja politik yang hanya dapat diukur dengan indikator efektivitas bukan dengan indikator efisiensi. Dalam prosesnya, selalu ada perbedaan pendapat, negosiasi serta tarik-menarik kepentingan dalam setiap tahapan kerja dalam DPR. Oleh sebab itu jumlah Undang-Undang yang berhasil diselesaikan DPR tidak dapat digunakan sebagai indikator pengukuran dalam penilaian kinerja DPR. Selain itu, DPR juga belum dapat dikatakan telah berhasil menjalankan fungsi legislasinya dengan baik bila menyelesaikan sebuah Undang-Undang namun tidak berkualitas serta tidak memenuhi inspirasi masyarakat.

Sama halnya dengan yang telah dikemukakan pada temuan riset Formappi tersebut diatas, masyarakat menilai bahwa DPR tidak bertanggungjawab kepada konstituen bila melalui fungsi legislasi, DPR cenderung merevisi beberapa Undang-Undang yang hanya berkaitan pada kepentingan DPR sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat.²⁹ Oleh sebab itu memang sangat sulit untuk menilai kinerja DPR dari jumlah Undang-Undang yang telah diselesaikan maupun Undang-Undang yang belum berhasil diselesaikan karena proses pembahasannya yang substansial. Belum lagi bila mengingat tingkat urgensi dan kesulitan tiap Undang-Undang yang akan dibuat berbeda-beda.

Diluar fungsi legislatif tersebut, dua fungsi lain DPR yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan adalah fungsi yang sulit untuk diukur. Kesulitan dalam pengukurannya karena baik fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan lebih kental nuansa politisnya daripada fungsi legislasi. Seperti halnya

²⁶ Viva.co.id, 29 September 2013, Survei 42,9 Persen Publik tak Puas Kinerja Anggota DPR, (online), (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/447750-survei--42-9-persen-publik-tak-puas-kinerja-anggota-dpr>, diakses pada tanggal 23 November 2015).

²⁷ Selasa, 30 November 2014, Kinerja DPR RI 2014-2019 Dinilai Lebih Buruk, (online), (<https://www.selasar.com/politik/kinerja-dpr-ri-20142019-dinilai-lebih-buruk>, diakses tanggal 23 November 2015).

²⁸ Tim Peneliti Center for Election and Political Party, Universitas Indonesia, "Mengukur Kinerja DPR RI Periode 2009-2014" Parlemen edisi 120 TH. XLIV, 2014, hlm. 31.

²⁹ Selasar, *Op. Cit.*

dalam pengawasan DPR banyak melakukan kegiatan namun karena sifatnya rekomendasi, seringkali hasil dari pengawasan DPR tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait.³⁰

Berangkat dari permasalahan yang ditemui tersebut dapat dipahami bahwa DPR sangat diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih akuntabel kepada masyarakat. Masyarakat juga turut mendesak agar DPR sebagai lembaga perwakilan dapat lebih merepresentasikan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik lagi. Dalam hal ini dukungan publik terhadap program kerja DPR sungguh diperlukan. Salah satu tolak ukur parlemen modern adalah adanya transparansi informasi dan pola komunikasi yang baik antara DPR dengan masyarakat. Informasi yang terbuka dan akurat memang perlu disampaikan langsung DPR kepada masyarakat. Selanjutnya yang juga harus dipahami bahwa kebutuhan publik yang paling mendasar atas keberadaan DPR adalah transparansi dan akuntabilitas.³¹ Melalui transparansi dan akuntabilitas masyarakat dapat turut berperan dalam mengawasi dan ambil bagian dalam program kerja DPR sebagai wakil dari konstituennya. Sehingga, setiap program DPR menjadi tepat guna bagi masyarakat.

Melalui parlemen modern, DPR sebagai lembaga representasi rakyat perlu untuk semakin memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selama ini hal tersebut dilakukan antara lain dengan melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerah serta melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menerima masukan terhadap kebijakan yang akan dibuat. Selanjutnya, anggota DPR secara individu maupun kelembagaan perlu meningkatkan pemberian informasi yang lebih berkualitas dan transparan kepada rakyat mengenai proses, program kegiatan, dan program kerja yang dilakukan parlemen melalui konsep parlemen modern.

B. Pendukung Parlemen Modern

DPR perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas informasi kepada masyarakat melalui publikasi terhadap setiap kegiatan kedewanan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan perlu semakin diperkuat DPR, antara lain adalah mengoptimalkan penggunaan fasilitas perpustakaan

di DPR, mengoptimalkan pelayanan museum DPR RI, mengoptimalkan pengelolaan website informasi DPR, serta mengoptimalkan penggunaan sosial media DPR.

Dalam mengoptimalkan penggunaan fasilitas perpustakaan di DPR, hal yang harus dilakukan adalah dengan semakin melengkapi koleksi perpustakaan terutama pada produk-produk hasil dari dalam DPR. Perpustakaan DPR juga perlu membangun *digital library* untuk menjangkau pengguna perpustakaan yang lebih luas termasuk masyarakat melalui media maya. Selanjutnya, dalam mengoptimalkan pelayanan museum DPR RI, DPR perlu melakukan edukasi politik agar masyarakat lebih mengenal DPR melalui museum DPR ini. Sedangkan, untuk menjangkau pengunjung museum yang lebih luas, perlu dibangun *virtual museum tour* yang terintegrasi dengan website DPR.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan website informasi DPR perlu adanya ruang agar terjadi interaksi virtual antara DPR dengan publik. Selanjutnya, untuk menjangkau pengguna website yang lebih luas, perlu dibangun website bilingual, dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Sehingga fasilitas tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak termasuk warga negara asing yang ingin mengetahui terkait info-info DPR. Terakhir, DPR juga perlu untuk mengembangkan penggunaan social media (twitter, FB, YouTube) DPR RI. Hal ini dilakukan agar setiap lapisan masyarakat dapat menjadi lebih dekat dengan DPR.³²

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana DPR ini penting guna mewujudkan cita-cita DPR dalam membangun parlemen modern yang sudah merupakan kebutuhan bangsa. Selain meningkatkan teknologi informasi berbasis internet, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperbaiki saat menuju parlemen modern. Salah satunya ialah dengan meningkatkan fasilitas melalui penataan kawasan Parlemen di lingkungan DPR RI. Menurut Sekjen AIPA (*Asean Inter Parliamentary Assembly*) P.O. Ram JP³³, taman Plaza Demokrasi merupakan salah satu hal yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat awam maupun para pengunjung rasa. Agar kegiatan unjuk rasa di kawasan DPR tersebut dapat lebih terkendali dan tidak mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, taman tersebut sama halnya dengan *Hyde Park* di London, Inggris dan *People Park Center* di Singapura. Dimana taman tersebut merupakan fasilitas terhadap semua orang untuk bebas berbicara maupun mengkritisi pemerintah dan parlemen.

³⁰ Tim Peneliti Center for Election and Political Party, Universitas Indonesia, Op. Cit.

³¹ Masnur Marzuki, 7 Juni 2015, Indonesia Belum Punya Konsep Parlemen Modern, (*online*), (<http://politik.beritaprima.com/indonesia-belum-punya-konsep-parlemen-modern/>), diakses tanggal 23 November 2015).

³² Reni Suwarso, "Parlemen Modern: Legacy DPR RI 2014-2019?", *Parliamentaria*, edisi 122 TH. XLV, 2015, hlm 28.

³³ *Parliamentaria*, Op.Cit. hlm 9, 24.

Dan, tidak akan ada sangsi selama seluruh prosedur dilewati agar ketertiban bisa terjaga.

Demikian pula dengan keberadaan fasilitas lain seperti museum parlemen dan perpustakaan DPR. P.O. Ram JP berpendapat bahwa museum mampu membuat warga negara terus belajar tentang sejarah perjuangan bangsa, sehingga meningkatkan rasa nasionalisme. Sedangkan, perpustakaan parlemen akan memudahkan setiap anggota dewan untuk melakukan riset terhadap setiap persoalan dari isu-isu krusial yang sedang terjadi. Perpustakaan yang lengkap akan membuat anggota dewan memiliki kapasitas dalam berargumentasi karena telah didukung fakta dan data.³⁴ Perpustakaan dengan koleksi yang lengkap juga akan memudahkan masyarakat dan setiap pihak yang membutuhkan referensi tentang DPR.

Parlemen modern melibatkan semua komponen baik secara internal maupun eksternal. Mulai dari sarana dan prasarana yang mumpuni dan juga SDM yang akan mensupport setiap kegiatan parlemen itu sendiri. Dalam hal ini Setjen DPR RI juga terus melakukan upaya pembenahan melalui reformasi birokrasi seperti menempatkan orang yang tepat didalam posisinya dengan konsep *the right man on the right place*. Terutama mempersiapkan dengan baik badan keahlian sebagai *supporting system* para anggota DPR dari sisi substansi. Selanjutnya dengan adanya rencana untuk membangun *Law Center* dalam DPR, DPR ingin mengembalikan tugas Badan legislatif tidak hanya dalam tataran pengharmonisasian setiap rancangan undang-undang saja tetapi juga melakukan penyusunan Legislasi.³⁵

Terkait keberadaan TV Parlemen dalam DPR, TV Parlemen mulai perlu untuk melakukan kerjasama dengan stasiun TV swasta. Tujuannya agar TV Parlemen dapat memiliki standar sebagai TV penyiaran dengan kapasitas peralatan dan SDM yang baik. Selain itu, DPR juga membutuhkan dukungan pers yang sehat dan kuat, agar kinerja parlemen sampai kepada masyarakat luas. Selama ini DPR seringkali mendapat porsi yang tidak seimbang dari media lain. DPR bahkan lebih sering disorot dari sisi negatif, namun kegiatan DPR seperti melakukan rapat hingga tengah malam, tidak terekspos media. Dengan adanya media penyiaran dari dalam DPR, setiap kegiatan DPR akan diketahui masyarakat. Oleh karena itu, DPR berharap dapat membuat stasiun siaran sendiri seperti CNN, dimana stasiun berita resmi yang DPR bangun akan menjadi sumber berita bagi media lain.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Agung Budi Santoso, "Bagian Pemberitaan DPR Garda Terdepan Modernisasi Parlemen", *Parliamentaria* Edisi 122 TH. XLV, 2015, hlm 18.

Dengan mengoptimalkan setiap pendukung konsep modern ini diharapkan DPR dapat bekerja dengan maksimal. Dilain pihak, masyarakat juga dapat langsung berinteraksi dengan DPR terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik, DPR memang harus senantiasa memberikan layanan informasi sebagai wujud transparansi lembaganya kepada masyarakat. Hal ini sebagai pembuktian bahwa DPR terus berusaha untuk memperbaiki diri serta dapat memberikan informasi yang jujur dan terpercaya baik diminta atau tidak tentang apa yang dilakukan DPR. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan upaya serius, keberanian, ketegasan, serta komitmen dan konsistensi dari DPR dalam pelaksanaannya. Seiring dengan itu, masyarakat terus berperan dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan kerja DPR agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara demokrasi.

C. Mewujudkan Parlemen Modern

DPR diharapkan dapat menjadi parlemen yang interaktif dengan konstituennya demi mendapatkan peningkatan dukungan publik terhadap program-program kerjanya. Dimana dalam prosesnya tentu diperlukan upaya yang berkesinambungan dari DPR untuk konsisten memberikan informasi secara langsung, akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dari dalam DPR. Hal ini penting karena masyarakat masa kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja DPR.

Selama ini, belum semua produk maupun dinamika yang terjadi dalam DPR baik yang berupa hasil sidang, proses pembentukan Undang-Undang, keputusan terkait kebijakan negara hingga perjanjian dengan negara lain, dapat secara cepat terinformasikan kepada publik. Namun melalui parlemen modern setiap kegiatan di DPR dapat mulai diinformasikan kepada masyarakat umum secara luas. Termasuk semua agenda rapat kerja DPR termasuk kunjungan kerja baik kunjungan kenegaraan di dunia internasional.

Salah satu hal yang dapat dilakukan DPR untuk membuka informasi yang berkualitas dan transparan kepada masyarakat adalah dengan memaksimalkan situs web parlemen, seperti *website* dpr.go.id dan parlemenkita.org. Karena, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, maka setiap kegiatan DPR terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri dari *website* parlemen tersebut. Melalui *web* tersebut, publik sebagai pengguna juga

akan mendapatkan informasi yang benar, tepat, cepat dan lengkap dari sumber informasi utama. Bukan informasi dari media lain yang mungkin tidak dapat menyajikan informasi secara faktual, lengkap dan detail sebagaimana website resmi DPR.

Melalui keterbukaan akses publik ini rakyat jadi dapat mengetahui apa yang dilakukan para wakilnya di DPR. Masyarakat juga dapat turut mengawasi secara langsung bagaimana DPR bekerja dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Karena, informasi mengenai kegiatan dewan akan selalu disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk laporan kegiatan. Keberadaan *website* tersebut juga harus terus dipenuhi dengan informasi yang terus diperbaharui, serta mudah digunakan oleh masyarakat. Sehingga, konsep parlemen modern ini akhirnya dapat membuka akses yang seluas-luasnya kepada publik untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.

Selain kedua situs tersebut, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pemanfaatan sejumlah media online seperti akun media sosial *twitter* @DPR_RI juga harus turut dioptimalkan penggunaannya oleh anggota parlemen untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Karena, akun media sosial dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara anggota dan rakyat. Dengan demikian, anggota DPR dapat menyebarkan informasi ke publik. Sementara publik dapat memberi aspirasi secara langsung kepada anggota DPR. Anggota DPR dan masyarakat dapat langsung berdiskusi terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui interaksi semacam ini kepercayaan masyarakat terhadap DPR diharapkan dapat meningkat.³⁷

Dukungan teknologi informasi memang sudah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah parlemen modern. Melalui teknologi informasi ini anggota DPR dapat dengan mudah memberikan informasi mengenai proses, program kegiatan, dan program kerja yang dilakukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerjanya kepada publik. Demikian pula teknologi informasi secara virtual akhirnya dapat mendorong DPR untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kertas (*paperless*). Media perantara konvensional juga diharapkan dapat diminimalisir untuk membudayakan pengurangan penggunaan kertas di DPR. Sebagai gantinya setiap anggota dewan didorong untuk lebih menggunakan komputer dan

tablet dan membuka serta mempelajari bahan rapat melalui email mereka.³⁸ Menurut Sekjen AIPA (*Asean Inter Parliamentary Assembly*) P.O. Ram JP, teknologi informasi parlemen modern seharusnya sudah sangat bergantung kepada teknologi informasi virtual. Bahkan parlemen Singapura sudah menerapkan kebijakan anggota dewan yang sedang bekerja di daerah konstituennya dapat mengikuti persidangan melalui jaringan *video conference*.³⁹ Hal seperti ini juga perlu untuk di terapkan DPR mengingat tuntutan masyarakat terhadap kemampuan anggota dewan untuk memahami dan merespon kebutuhan publik semakin meningkat.

Di lain pihak, teknologi ini juga akan menjadi sarana bagi publik untuk mengawasi kinerja para wakilnya di parlemen. Pada prinsipnya, publik dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai media, baik melalui surat elektronik (*email*), *polling* di *website*, komentar dan rekomendasi di *twitter* ataupun bahkan mengunduh aspirasi melalui *youtube* terkait aspirasi mereka terhadap DPR.⁴⁰ Publik dapat memberikan pandangan atau pernyataan sikap mereka tentang setiap isu yang sedang terjadi di DPR secara cepat dan segera. Melalui media sosial publik yang diwakili oleh para anggota DPR menjadi lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi yang perlu ditindaklanjuti oleh anggota dewan.

Selain itu, berdasarkan tujuan konsep parlemen modern untuk meningkatkan fungsi representasi dewan. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan DPR untuk mewujudkannya. Cara tersebut diantaranya adalah dengan mengoptimalkan sistem rekam jejak lembaga dewan (*Bill Digest*). Hal ini penting karena sistem *Bill Digest* ini dapat digunakan untuk lebih membuka ruang sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Berikutnya DPR perlu mengoptimalkan sistem rekam jejak anggota dewan (*Hansard*). *Hansard* ini dapat digunakan untuk menginformasikan opini dan posisi politik anggota dewan terhadap isu-isu tertentu. Selanjutnya, baik sistem *Bill Digest* maupun *Hansard* tersebut perlu diintegrasikan dengan *website*.⁴¹ Proses pembuatan, pembahasan Undang-Undang, maupun informasi mengenai aspirasi kelompok masyarakat yang diakomodir juga perlu di informasikan DPR kepada masyarakat secara terbuka. Hal ini penting karena akuntabilitas yang dipahami masyarakat sangat sederhana, yaitu apa

³⁷ Fahri Hamzah, 10 Agustus 2015, Optimalisasi Peran Tenaga Ahli Wujudkan parlemen Modern, (*online*), (<http://politik.news.viva.co.id/news/read/659262-optimalisasi-peran-tenaga-ahli-wujudkan-parlemen-modern>, diakses tanggal 23 November 2015).

³⁸ Fahri Hamzah, "Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Reformasi Parlemen Menuju DPR Modern", *Parliamentaria*, Edisi 122 TH. XLV, 2015, hlm 12.

³⁹ P.O. Ram JP, "Penting Selalu Jaga Standar Keamanan", *Parliamentaria*, edisi 122 TH. XLV, 2015, hlm 25.

⁴⁰ Reni Suwarso, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 28.

yang secara nyata dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Karena, masyarakat sebenarnya tidak memerlukan laporan pertanggungjawaban baku dari anggota dewan, mereka hanya perlu aspirasi mereka berhasil diwujudkan oleh DPR.

Saat ini sudah tersedia media bagi setiap anggota DPR untuk dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Bila melihat dari web dprkita.org/webapps/public/aspirasi#/ sudah banyak komentar masyarakat yang muncul sebagai bentuk aspirasi kepada DPR. Banyak masyarakat yang menyampaikan pertanyaan kepada DPR terutama terkait fungsi legislasi dan pengawasan. Untuk fungsi legislasi DPR, ada pertanyaan dari masyarakat mengenai RUU, seperti contohnya kapan pengesahan RUU Disabilitas dilaksanakan. Sementara itu, terkait fungsi pengawasan ada beberapa aspirasi dari masyarakat seperti mempertanyakan bagaimana kesiapan UKM dalam menghadapi MEA, mengadakan tentang keresahan munculnya limbah plastik, maupun meminta perjuangan DPR untuk perbaikan jalan antar kecamatan sampai ke kotanya. Selain itu ada beberapa komentar masyarakat yang hanya menyapa anggota yang merupakan perwakilan dari dapilnya.⁴²

Namun demikian, semua aspirasi tersebut tidak mendapat tanggapan langsung dari DPR maupun anggota DPR. Aspirasi masyarakat tersebut seolah-olah hanya berjalan searah tanpa ada jawaban. Belum adanya komunikasi timbal balik yang membuat masyarakat mendapat jawaban dari kebutuhannya. Dilain sisi dari web tersebut telah disediakan kolom Podium Anggota DPR, sebagai media yang disediakan bagi anggota DPR namun belum semua anggota DPR mengisinya. Kolom ini pun tidak dapat ditanggapi secara langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa media yang telah disediakan oleh lembaga parlemen itu sendiri belum dapat mengakomodir dengan baik komunikasi timbal balik sesuai yang diharapkan. Kedepan tentu web dan media komunikasi antara masyarakat dan anggota DPR harus semakin diperbaiki. Walaupun dengan adanya media tersebut sudah merupakan kemajuan bila dibandingkan dengan DPR pada periode yang lalu. Dimana, masyarakat belum atau tidak memiliki media aspirasi virtual secara langsung kepada para wakilnya.

Namun demikian, belum terjadinya interaksi secara langsung, ditambah belum adanya kesadaran dari kedua pihak baik masyarakat maupun anggota dewan untuk memaksimalkan media tersebut, membuat konsep parlemen modern yang terbuka, informatif dan akuntabel masih memerlukan

proses yang cukup lama. Kedepan tentu konsep parlemen modern ini harus terus didorong dan terus disosialisasi serta publikasikan agar konsep ini dapat berjalan bagi kebaikan masyarakat.

Membangun parlemen modern tentu membutuhkan waktu serta dukungan dari semua pihak, baik dari internal maupun eksternal DPR. Karena DPR yang modern tentu akan memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia, membangun rasa cinta tanah air, bahkan memperkuat kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.⁴³ Oleh karena setiap hal-hal yang telah diuraikan diatas harus terus menerus secara konsisten dilakukan demi perbaikan kredibilitas DPR dimasa mendatang.

Secara garis besar, indikator parlemen modern ialah parlemen yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR. Dan, pada akhirnya masyarakat akan lebih mendukung kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen karena unsur keterlibatannya. Oleh sebab itu, masyarakat perlu untuk semakin paham dengan fungsi dan peran DPR. Kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam kinerja DPR ini yang akan membuat kredibilitas DPR dalam masyarakat meningkat. hal tersebut yang menjadi indikator terhadap penerapan keberhasilan konsep parlemen modern ini di DPR.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan fungsi yang dimilikinya, selama ini kinerja DPR dinilai belum memuaskan masyarakat. Berbagai lembaga riset menemukan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR sejak DPR periode yang lalu. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta tanggungjawab DPR kepada masyarakat. DPR telah mengembangkan konsep baru yaitu konsep parlemen modern demi terciptanya DPR yang dapat berkinerja dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat.

Membangun parlemen modern tentu membutuhkan waktu serta dukungan dari semua pihak, baik dari internal maupun eksternal DPR. Selain mengusung konsep pemanfaatan penggunaan teknologi informasi digital, seperti website dan sosial media yang langsung dikelola oleh DPR, DPR juga mempersiapkan peningkatkan fasilitas sarana dan prasarana DPR untuk mensukseskan parlemen modern ini. Dalam peningkatan kualitas SDM, Setjen DPR RI terus berupaya melakukan pembenahan melalui reformasi birokrasi dan mempersiapkan badan keahlian sebagai *supporting system* para anggota DPR dari sisi substansi. DPR juga berencana untuk membangun *Law Center*, meningkatkan

⁴² <http://dprkita.org/webapps/public/aspirasi#/page/1>, diakses tanggal 10 Oktober 2015.

⁴³ Reni Suwarso, *Op.Cit*, hlm. 26-28.

kualitas TV Parlemen, melakukan penataan kawasan Parlemen di lingkungan DPR RI dengan membuat taman Plaza Demokrasi, perbaikan museum parlemen dan peningkatan kapabilitas perpustakaan DPR.

Hasil kinerja yang hendak dicapai DPR melalui parlemen modern adalah *pertama*, terwujudnya akses yang mudah bagi publik dalam mengakses informasi kinerja DPR. *Kedua*, meningkatnya penggunaan teknologi dalam memperoleh informasi tentang proses dan hasil kinerja DPR, diantaranya melalui website dan sosial media. *Ketiga*, meningkatnya pemahaman publik mengenai peran dan fungsi DPR-RI. *Keempat*, meningkatnya kredibilitas DPR RI menjalankan fungsi perwakilan dengan semakin meningkatnya kemudahan publik dalam mengawasi DPR RI.

Dengan konsep parlemen modern ini hal utama yang akan dilakukan DPR ialah mengusung kegiatan publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik. Hal ini dalam upaya membangun citra positif dimata masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi. Oleh sebab itu, selain dari dalam DPR, DPR juga membutuhkan dukungan baik dari masyarakat maupun pers yang sehat dan kuat, agar kinerja parlemen sampai kepada masyarakat luas. Dalam hal ini kontrol masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan sangat diperlukan.

Kinerja DPR yang adalah kerja politik hanya dapat dinilai bilamana visi DPR sebagai lembaga representasi masyarakat dapat tercapai secara efektif. Oleh sebab itu dalam membangun DPR RI sebagai parlemen modern DPR perlu secara konsisten memberikan informasi yang langsung, akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Sehingga melalui parlemen modern ini diharapkan DPR dapat meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perkembangan jaman dan mampu menjawab serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedepannya, tentu konsep parlemen modern ini harus terus didorong dan terus disosialisasi serta publikasikan agar konsep ini dapat berjalan bagi kebaikan masyarakat serta memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia, membangun rasa cinta tanah air, bahkan memperkuat kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. (1998). *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Jenkins, Henry and Thorburn, David, ed., (2004). *Democracy and New Media*, Cambridge: MIT Press.
- Marijan, Kacung. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ranney, Austin. (1996). *The Governing of Man*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Saco, Diana. (2002). *Cybering Democracy: Public Space and The Internet*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Stanbury, W.T (2003). *Accountability to citizens in the westminster Model of Government: More Myth Than Reality*, Vancouver: Fraser Institute.
- Qodri, Azizi, A., 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Berry, A.J. (2005). *Accountability and Control in a Cats Cradle, Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol 18 No. 2.
- Ebrahim, A. (2003). *Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs. World Development*, Vol 31 No 5.
- Gray, R., Bebbington, Jan and Collison, David (2006). *NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital. Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19, no. 3.
- Kluvers, R. and Tippett, J. (2010). *Mechanisms of accountability in local government: an exploratory study, International Journal of Business and Management*, Vol. 5 No.7.
- Lincoln Dahlberg, (2011). *Re-Constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions', Online Journal: Sage Publication*.
- Mansbridge, Jane, (2003). *Rethinking Representation, American Political Science Review*, Vol. 97, No. 4 November 2003. Cambridge: Harvard University.

Dokumen Resmi

DPR RI. (2015). *Ringkasan Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014—13 Agustus 2015), Langkah DPR Menuju Parlemen Modern Dalam Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

European Commission. (2000). Paper Review: The Future of Parliamentary Democracy: Transition and Challenge in European Governance, Green Paper for the Conference of the European Union, Brussel: Sekretariat General European Commission.

Laporan dan Majalah

Center for Election and Political Party FISIP-UI. (2014). DPR RI: Parlemen Modern Yang Menabuh Genderangnya Sendiri, Depok: Center for Election and Political Party FISIP-UI.

Center for Election and Political Party FISIP-UI. (2015). Kerangka Acuan Kegiatan Bekerja Membangun Parlemen Modern, Depok: Center for Election and Political Party FISIP-UI.

Lalolo, Loina Krina P. (2003). Indikator dan alat Ukur Prinsip akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2014). Parlemen edisi 120 TH. XLIV, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2015). Parlemen, Edisi 122 Th. XLV, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Webber, Robyn. (2000). Increasing Public Participation in the Work of Parliamentary Committees, dalam jurnal Public Sector Attitudes to Parliamentary Committees. – A Chairman's View, pada acara seminar ASPG Parliament 2000 – Towards a Modern Committee System 2001.

Website

Andriadi, Fayakhun. 27 Mei 2015, Era Digital Diuntungkan Pejabat dan Politisi, Tapi Jadi Neraka Bila Kontrol Diri Lemah, (*online*), (<http://www.rmol.co/read/2015/05/27/204100/Fayakhun-Andriadi:--Era-Digital-Untungkan-Pejabat-&Politisi,-Tapi-Jadi-Neraka-Bila-Kontrol-Diri-Lemah->), diakses tanggal 3 Desember 2015).

Hamzah, Fahri. 10 Agustus 2015, Optimalisasi Peran Tenaga Ahli Wujudkan parlemen Modern, (*online*), (<http://politik.news.viva.co.id/news/read/659262-optimalisasi-peran-tenaga-ahli-wujudkan-parlemen-modern>), diakses tanggal 23 November 2015).

Hansard Society. (2011). Parliaments and Public Engagement: Innovation and Good Practice from Around the World, hlm.37, (*online*), (<http://www.hansardsociety.org.uk/wp-content/uploads/2012/10/Parliaments-and-Public-Engagement-2012.pdf>), diakses 2 Desember 2015).

Kompas.com. 29 September 2013, Survei Insis Publik Makin Tak Puas kinerja DPR, (*online*), (<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/29/1224051/Survei.Insis.Publik.Makin.Tak.Puas.pada.Kinerja.DPR>), diakses tanggal 23 November 2015).

Marzuki, Masnur. 7 Juni 2015, Indonesia Belum Punya Konsep Parlemen Modern, (*online*), (<http://politik.beritaprima.com/indonesia-belum-punya-konsep-parlemen-modern/>), diakses tanggal 23 November 2015).

Max Planck Society. (2013). Ten Years After the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, (*online*), (http://openaccess.mpg.de/mission-statement_en), diakses tanggal 3 Desember 2015).

Openingparliament.org. (2012). Declaration on Parliamentary Openness, (*online*), (<http://www.openingparliament.org/declaration>), diakses tanggal 3 Desember 2015).

Selasar. 30 November 2014, Kinerja DPR RI 2014-2019 Dinilai Lebih Buruk, (*online*), (<https://www.selasar.com/politik/kinerja-dpr-ri-20142019-dinilai-lebih-buruk>), diakses tanggal 23 November 2015).

Tempo. 20 Oktober 2013, Lagi Hasil Survei Kinerja DPR Buruk, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2013/10/20/078523131/Lagi-Hasil-Survei-Kinerja-DPR-Buruk>), diakses tanggal 23 November 2015).

Viva.co.id. 29 September 2013, Survei 42,9 Persen Publik tak Puas Kinerja Anggota DPR, (*online*), (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/447750-survei--42-9-persen-publik-tak-puas-kinerja-anggota-dpr>), diakses pada tanggal 23 November 2015).